



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOR ROSYID ARDANI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI
3. NHK : 269329

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 620.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m²/45 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m²/168 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 66.000.000

1. MOBIL, PROTON EXORA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 314.223.418**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.003.223.418

III. HUTANG Rp. 792.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 211.223.418

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.